

BERAWAL DARI TARIKH 1965: RELASI MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK KECERDASAN KULTURAL DALAM [MENCIPTAKAN] HARMONISASI

IKHTIAR HATTA

*Program Doktor Antropologi, Departemen Antropologi, Fisip Universitas
Indonesia, Depok.*

*Pengajar di Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Tadulaku
email: konsumerisme@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan variasi respons masyarakat setelah terjadinya peristiwa G. 30 S/PKI. Peristiwa politik nasional yang terjadi menjelang awal berkuasanya rezim Orde Baru di Indonesia ini, menyisakan kecurigaan terhadap situasi yang dianggap harmonis dalam masyarakat. Apa yang tampak harmonis, bagi sementara kalangan, dianggap sebagai hasil dari upaya yang secara sengaja “disenyapkan” sehingga menjadi tampak seolah tidak problematis lagi. Melalui penelitian mini etnografi di Kelurahan Muda, penulis mendalami fenomena ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih memadai. Untuk mencapai pemahaman itu, penulis menyelami kejadian peristiwa G. 30 S/PKI sesungguhnya pada masyarakat Kelurahan Muda terkait. Selanjutnya, penulis meninjau nuansa harmonis dalam relasi-relasi masyarakat beserta kekuatan di baliknya yang memungkinkan terciptanya suasana harmonis. Penulis juga menggali kekuatan kultural masyarakat Kelurahan Muda sehingga mampu mentransformasikan memori 1965 yang sarat konflik sehingga menjadi suasana yang harmonis di tengah konteksasi di antara orang Kelurahan Muda.

Kata Kunci: Peristiwa G.30S/PKI, Orde Baru, Kecerdasan Kultural, Harmonisasi

Abstract

This article discusses the response variations' of communities pasca incident G 30 S / PKI. Political events nationwide happens Toward Early reign of the New Order regime in Indonesia, leaving suspicion against the situation is considered harmonious society. What appears harmonious is regarded as the findings from efforts operative deliberately "silenced" being looked so not problematic again. Through mini ethnographic research in the Kabupaten Muda, the author studied the phenomenon for a review Singer obtain adequate understanding. To review reach an understanding, author plumbed Genesis Event G. 30 S/PKI actual on 'Subscription Young Village community. Furthermore, the authors review nuance harmonious relations-relations' society along with the power behind it which allows the creation of a harmonious atmosphere. Also writer digging cultural force Kabupaten Muda community thus able to transform conflict memory 1965so become the harmonious atmosphere in the contenstation among Kabupaten Muda people.

Keywords: Events G.30S / PKI, New Order, Cultural Intelligence, Harmonization

Pengantar

Artikel ini merupakan hasil penelitian ini bersifat mini etnografi. Titik awal gagasannya bermula pada peristiwa kemanusiaan pada tarikh 1965. Peristiwa ini terjadi sesaat sebelum rezim Orde Baru berkuasa di negeri ini, yang selanjutnya dilabeli sebagai G. 30 S/PKI.¹ Peristiwa tersebut terjadi “hampir” di seluruh wilayah Indonesia, namun dengan intensitas dan kualitas yang berbeda. Bahkan, boleh jadi di setiap tempat memiliki *term* yang berbeda atas peristiwa tersebut. Artinya, walaupun peristiwa ini sifatnya nasional, tetapi respons dan persepsi masyarakat terhadap peristiwa ini cukup variatif dan kontekstual.

Melalui media cetak atau elektronik, peristiwa G. 30 S/PKI yang terbentuk di benak orang cukup kuat umumnya yang terjadi di pulau Jawa, tepatnya peristiwa penculikan para Jenderal. Hal ini tentunya dapat dimaklumi. Namun tidak berarti bahwa peristiwa serupa di daerah lain tidak begitu penting. Misalnya, di Kelurahan Kamase, Kabupaten Muda², sebuah kelurahan yang berjarak 100 kilometer dari kota Makassar ke arah Utara. Secara administratif, kelurahan ini

berbatasan langsung dengan Kotamadya Pare-Pare. Seperti kebanyakan daerah lainnya, Kelurahan Kamase tidak luput dari peristiwa G. 30 S/PKI, walaupun skalanya tidak sedramatis yang terjadi di Pulau Jawa. Bahkan boleh jadi lebih banyak “disenyapkan” atau “disembunyikan”, sehingga sepintas lalu peristiwa itu menjadi “seolah” tidak problematis kemudian. Pemahaman (tidak dramatis) ini terjadi di tingkat masyarakat secara umum dan kalangan berpendidikan secara khusus. Mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal mendapatkan informasi dari mata pelajaran Sejarah di bangku sekolah. Lantas, “apa masalahnya” ketika masyarakat tampak harmonis dalam relasinya satu sama lain setelah terjadinya peristiwa G. 30 S/PKI? Sebagai pendapat saya, peristiwa G. 30 S/PKI justeru telah selesai dan meninggalkan kondisi harmonis di masyarakat sehingga dipandang tidak problematis lagi.

Ketika pemahaman penelitian ini didudukkan dalam kerangka konflik atau kekerasan, seringkali muara pemahaman terutama menuju pada pencarian jalan keluar guna mencapai realitas harmonis (*social order*) dalam masyarakat. Tekanan pemikiran struktur fungsional tidak jarang masih

¹ Agar peristiwa ini mudah dipahami dalam desain etnografi, maka untuk sementara saya gunakan *term* “G.30 S/PKI”. Penggunaan yang lebih sering dan berulang atas *term* ini sepanjang tulisan ini sama sekali tidak bermaksud melanjutkan atau melakukan keberpihakan wacana terhadap apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Penggunaan

term ini akan berhenti ketika dalam penelitian lapangan ditemukan nantinya *term* yang dipahami oleh masyarakat tineliti.

² Nama orang dan tempat dalam tulisan ini sengaja disamarkan oleh penulis dengan tidak menampilkan bukan sebenarnya, berdasarkan permintaan yang bersangkutan.

berpengaruh kuat menuntun kita. Jika pemahaman ini dioperasionalkan untuk memahami realitas di Kelurahan Kamase, ternyata tidak ditemukan hal yang problematis di sana pasca terjadinya peristiwa G. 30 S/PKI tersebut.³

Sumbu konflik dari peristiwa G. 30 S/PKI nyaris terkubur serta semuanya ke dalam “Lubang Buaya”. Jejak disharmomis dalam relasi masyarakat seolah hilang tenggelam oleh aroma harum bunga yang menghampar di atasnya. Lantas, apa lagi yang problematis setelah itu? Penelitian ini ingin meyakinkan dalam beberapa hal, yakni: apakah peristiwa itu betul-betul terkubur dan tidak meninggalkan jejak di tengah masyarakat yang sudah hidup rukun? Bagaimana suasana harmonis itu hadir dan menggantikan suasana sebelumnya yang ditandai keretakan relasi dalam masyarakat tanpa (seolah) meninggalkan dendam dan kepedihan lainnya? Kekuatan internal seperti apakah yang menyokong harmonisasi sehingga dapat melenggang di tengah-tengah masyarakat? Padahal, di balik kondisi-kondisi yang dianggap harmonis tersebut, upaya-upaya pewacanaan G. 30 S/PKI masih tetap kuat, termasuk pelabelan dan pembantaian menjadi “koper” sejarah yang tidak turut dikuburkan, tetapi tetap bersemayam dalam endapan

memori setiap orang, dan mungkin saja ditransmisikan ke generasinya.

Paparan berbagai realitas berkaitan respons masyarakat terhadap peristiwa G. 30 S/PKI, terutama setelah terjadinya peristiwa ini, menuntun refleksi untuk meninjau lebih dalam lagi relasi-relasi yang dipraktekkan oleh setiap orang di tengah masyarakat yang penuh dengan pelabelan PKI dari tarikh 1965. Fokus perhatian penelitian terutama pada relasi masyarakat di tengah memori label PKI yang selanjutnya mereka transformasikan menjadi sebetuk kecerdasan kultural.

Fokus Kajian dan *Body of Knowledge*

Secara umum, memahami kondisi masyarakat yang *chaos* ada kecendrungan melihatnya dengan kerangka konflik, dan tidak jarang dilihat dalam pertentangan kelas. Peristiwa G. 30 S/PKI boleh jadi awalnya didasari oleh pertentang kelas, namun seringkali juga tidak demikian.

Berbicara tentang konflik dalam suatu masyarakat adalah berbicara tentang realitas yang sudah terjadi, yang dilakukan adalah mencoba memahami konflik kenapa sampai semua terjadi. Memahami konflik, kita seringkali berangkat dari sudut

³ Seandainya di Kelurahan Muda masih terganggu oleh peristiwa G.30S/PKI, dalam artian tidak harmonis, maka Saya tidak memutuskan untuk meneliti dengan topik yang diajukan ini. Kenyataannya masyarakat

di sana hidup dengan harmonis. Mereka sama sekali tidak terganggu oleh peristiwa ini. Kondisi ini telah tercipta segera sejak peristiwa terjadi.

pandang mengurai faktor-faktor penyebab dan mengambil kesimpulan yang sifatnya etis dan abai terhadap keberadaan relasi-relasi sifatnya minor namun memiliki sisi harmonisasi.

Bahkan, dalam penelitian tentang konflik pada umumnya harmonisasi ditempatkan sebagai tujuan akhir dari sebuah konflik dengan model kehadiran orang luar yang tidak memiliki kesejarahan (*a historis*) dengan masyarakat untuk mengurai konflik seperti aparat keamanan, LSM dan Ilmuan. Pertanyaan ontologis harmonisasi adalah apakah ia sesuatu yang dihadirkan, dan itu berarti diluar dari masyarakat dan sifatnya *a historis*. Ataukah harmonisasi adalah sesuatu yang ada dalam masyarakat dan berkonteksasi di tengah relasi sosial masyarakat?

Pada intinya penelitian ini mempertanyakan bagaimana kekuatan kultural masyarakat mentransformasikan memori pelabelan peristiwa 1965 sehingga tercipta suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat. Jawaban terhadap permasalahan ini ditelusuri dengan mengungkapkan respons dan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan: (1) apa sesungguhnya yang terjadi dengan peristiwa 1965 di tengah masyarakat Muda?; (2) bagaimana nuansa Harmonisasi di tengah relasi masyarakat?; (3) kekuatan internal seperti apa yang mendorong terjadinya harmonisasi?; (4) bagaimana kekuatan kultural masyarakat mentransformasi memori

1965 menjadi harmonisasi?; (5) bagaimana konflik dan harmonisasi dihadirkan, dimaknai dan digunakan di tengah konteksasi orang Muda?

Perspektif

Pendekatan wacana untuk memperebutkan makna, di mana Bourdieu memaparkan bahwa bahasa/wacana merupakan bagian dari aktivitas di mana sebagian orang mendominasi yang lain. Karenanya bahasa/wacana berperan penting untuk mendefinisikan suatu kelompok, memberikan otoritas bagi pelaku sosial serta menghadirkan kekuasaan untuk berbicara atas nama kelompok.

Di tengah itulah sebenarnya terjadi pertarungan wacana *heterodoxa* VS *orthodoxa*, dimana kelompok yang minim secara modal terus mempersoalkan otoritas wacana kelompok dominan dalam mendefinisikan dunia sosial.

Pemahaman di atas semakin menunjukkan artikulasi mendalam ketika menyandingkannya dengan pemahaman C. Pelras bahwa orang Bugis memiliki acuan nilai konsepsi *siri'* dan *pesse* yang mendorong polarisasi untuk tampak kontradiksi: persaingan dan kesetiakawanan, berpandangan hierarkis dan egalitarian, dorongan untuk berkompetisi sekaligus berkompromi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muda Propinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa di wilayah ini pun pernah terjadi

pembunuhan, penculikan bahkan pelabelan terkait peristiwa G. 30 S/PKI. Artinya peristiwa ini sedikit banyaknya menorehkan luka sosial di dalam setiap orang yang terkait secara langsung, dan mungkin diwariskan oleh masyarakat. Namun demikian, kondisi harmonis telah lebih kuat menemani kehidupan masyarakat entah dihadirkan atau ia bertumbuh secara internal sebagai sebuah proses sosial atau boleh jadi keduanya.

Teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkait dengan fokus kajian adalah wawancara mendalam. Peneliti dengan cara hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai instrumen kunci untuk mengungkap logika konflik dan harmonisasi masyarakat. Selain itu dilakukan teknik pengamatan untuk memberikan gambaran kasat-mata praktik kehidupan sosial masyarakat, dan metode pencatatan.

Metode perekaman dengan *tape recorder* dan pemotretan tidak dilakukan karena permintaan tineliti secara langsung sedari awal sewaktu saya menelpon, dan meminta untuk tidak usah direkam atau difoto. Informan yang dipilih adalah mereka yang merasakan langsung peristiwa dan atau mendapatkan informasi dari keluarga atau kerabatnya, informasi apa yang didapatkan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun

1965 dan setelahnya, serta bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sosialnya ditengah kondisi konflik dari peristiwa 1965 tersebut. Unit analisis adalah pada keluarga-keluarga yang secara langsung mengalami peristiwa G. 30 S/PKI. Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk deskriptif analitis, dan setiap informasi sedapat mungkin dilakukan kroscek atas data yang lain dengan informan yang berbeda.

Sebuah Cerita: Awalan Peristiwa 1965 Bagi Orang Muda

Berawal dari Tarikh 1965 sebuah cerita dimulai, peristiwa kemanusiaan sekaligus sebagai momentum berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, di dalamnya berisi “penghianatan”, “patriotisme”, “pelecehan”, “pembunuhan”, “Pemutarbalikan”, ataupun “pensenyapan” di atas kerangka “Demi Bangsa dan Tanah Air Indonesia”. Peristiwa ini sungguh sangat kelam dan menyasar hingga “nyaris” ke seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia pada kala itu. Peristiwa yang dikenal dengan G.30.S/PKI, yang titik puncaknya terjadi pada peristiwa penculikan oleh sekelompok tentara cakrabirawa terhadap beberapa pimpinan TNI yang potensial⁴ yang terjadi pada subuh hari, tepatnya 1

⁴ Oleh beberapa manuscip dan film yang berporsi Orde Baru menarasikan bahwa mereka yang menculik adalah penghianat bangsa, dan para jenderal yang diculik dan kemudian dibuang ke lubang buaya adalah

Jenderal potensial yang pernah dimiliki oleh bangsa ini, dan pada akhirnya menjadi korban. Negara kemudian memberikan label pada jendral tersebut sebagai pahlawan Revolusi.

Oktober 1965. Peristiwa itu semakin menyayat hati oleh sejumlah bangsa Indonesia ketika pengkostruksianya dilihat dalam bentuk film, di tengah narasinya menunjukkan para penculik melakukannya dengan serampangan yang menyebabkan Ade Irma Suryani⁵ pun turut menjadi korban.

Hari ini⁶ narasi tentang peristiwa 1965 banyak diceritakan kembali baik dalam bentuk film, buku sejarah, puisi⁷ dengan sudut pandang yang jauh berbeda dan bahkan berseberangan dengan wacana dominan Orde Baru sebelumnya, yang oleh Bourdieu disebutnya sebagai pertarungan/kom-petisi wacana antara *Ortodoxa* dan *Heterodoxa* yang berorientasi mencapai *Doxa*.

Apapun orientasi dari wacana tersebut ia sudah terpapar mewarnai alam perdebatan di tarikh 1965 tersebut. Kebisingan wacana tersebut semuanya dikontekskan di Jawa. Hal itu dapat dimengerti karena peristiwa terbesarnya berada di sana. Namun sebagai sebuah peristiwa nasional berbangsa dan bernegara,

wilayah lain di luar Jawa juga memiliki historisitas-nya tentu dengan kadar kesedihan, penderitaan, pengorbanan yang berbeda. Tetapi tetap menjadi penting diceritakan karena di sana tetap meninggalkan jejak sebagai peristiwa kemanusiaan dan sekaligus peristiwa berbangsa dan bernegara yang patut mendapatkan perhatian.

Sebutlah di antaranya tempat itu adalah di Muda. Dalam perkembangannya sebagai sebuah wilayah tempat ini tidak banyak momen sejarah besar (sejarah sebagai yang *an sich*) yang dapat diceritakan, karena tempat tersebut selalu hanya menjadi bagian pinggiran ataupun catatan kaki sebuah penceritaan besar dari peristiwa besar yang dipaparkan. Tetapi sejarah dalam artian pemikiran Nietzsche⁸ maka tempat ini pun akhirnya memiliki ruang dan kesempatan untuk memaparkan narasinya yang kontekstual.

Pada saat sebelum pecah peristiwa 1965 dan adanya instruksi dari Pusat/Jakarta untuk melakukan

⁵ Sejah ini penulis tidak mendapatkan informasi apakah ini mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, atau hanya sekedar dikenang sebagai bagian korban dalam narasi dari peristiwa tersebut.

⁶ **Hari ini** bukan sebuah penunjukkan nama-nama hari, tetapi Penunjukannya lebih pada sebuah fase historitas, dalam arti kejadian tersebut menjadi wacana yang terpapar penuh dengan interpretasi yang sangat kontekstual dan historis. Setelah era orde baru kita bisa menemukan gelombang wacana yang mencoba menginterupsi wacana dominan yang bertengger di benak bernegara

warga Indonesia bahwa PKI, minimal mengurai bagian-bagian yang dibelokkan oleh sebuah orde setelah sekian lama disenyapkan.

⁷ Boleh jadi ini yang dimaksudkan oleh Wijaya Herlambang dalam Bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965...yang kemudian dilawan dengan budaya.

⁸ Lihat uraian lebih jelas di artikel Michel Foucault berjudul Nietzsche, Genealogi, dan Sejarah dalam buku "Tafsir Politik Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer, 2002, Qalam, Yogyakarta. (Michael T. Gibbons. Edt.).

“pembersihan” dan “penangkapan” orang yang diduga atau berada dalam daftar sebagai anggota PKI, masyarakat Muda sudah mengenal dan ada beberapa di antaranya yang sudah masuk menjadi anggota dari Partai Komunis Indonesia. Hanya saja tidak begitu besar dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa alasan kurangnya masyarakat Muda menjadi anggota dari organisasi/partai tersebut. Di antaranya adalah jumlah penduduk masyarakat Muda pada saat itu relatif masih sangat kurang, selain itu tingkat pendidikan orang Muda masih sangat rendah sehingga untuk masuk berhimpun dalam sebuah organisasi masyarakat masih jauh dari orientasi hidupnya, dan alasan yang paling penting lainnya adalah masih dekatnya secara memori dan waktu peristiwa bersejarah pemberontakan Kahar Muzakkar yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini oleh orang Muda tentunya masih menyisahkan trauma dan ketakutan, yang berbuntut pada keengganan dan ketakutan masuk ke dalam Partai.

Menurut informasi, pada tahun 1965 itu, beberapa orang di Muda yang tersebar di beberapa tempat masuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Awal masuknya mereka merasakan masih nyaman dan tidak ada persoalan. Mereka menjadi anggota ke dalam Partai Komunis Indonesia dipahami sebagai ruang politik yang tidak ada bedanya dengan ketika masuk menjadi

anggota PSI atau organisasi kepemudaan NU yang mereka kenal dengan organisasi Grakan Pemuda Ansor.

Pintu masuk yang paling awal bagi orang Muda pada saat itu dimulai oleh pegawai penjara. Melalui pegawai penjara yang berjumlah tidak lebih dari 15 orang yang dipimpin oleh Dg. Gassing saat itu mempropaganda pegawai lainnya untuk ikut bergabung ke dalam partai tersebut. Karena bujuk rayu pimpinan, pada akhirnya sebagian besar sipir penjara saat itu menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia.

Kesediaan mereka masuk menjadi bagian dari partai tersebut menurut sejumlah keterangan yang diperoleh di lapangan, menjelaskan para pegawai penjara tersebut akhirnya masuk bukan karena mereka memahami dengan jernih orientasi politik dan aliran politik dari partai tersebut, apakah berpihak atau tidak berpihak pada mereka. Alasan masuknya lebih karena propaganda dari seorang pimpinan dan dibumbui dengan pemberian bahan-bahan kebutuhan masyarakat seperti dijanji akan diberikan gula 2-3 liter, minyak, pakaian, yang sedianya ditunaikan tiap bulannya, dan peralatan pertanian seperti cangkul. Dan beberapa bulan setelahnya menurut keterangan mereka betul-betul mendapatkannya. Bujuk rayu ini tentunya semakin meyakinkan mereka dan menggeser orientasi politik mereka ke Partai Komunis Indonesia.

Pemberian secara gratis sejumlah item kebutuhan pokok tiap bulan itu tentulah dipahami sebagai “durian runtuh” di tengah kondisi yang masih begitu sulitnya mendapatkan bahan kebutuhan pokok seperti gula dan minyak pada kala itu karena sulitnya jalur transportasi antar daerah. Distribusi bahan makanan dari Kota Makassar yang berjarak 100km. ke Kabupaten Muda dan atau dari Kota Pare-Pare yang berjarak 45km.⁹ harus ditempuh sehari-hari disebabkan kondisi jalan yang tidak bagus dan jumlah kendaraan dari dan ke di dua tempat tersebut relatif masih sangat kurang. Misalnya saja, masyarakat yang bertujuan ke Makassar biasanya menyiapkan *doko' nanre* /makanan sebagai bekal di jalan, karena perjalanan ke makassar pada saat itu bukan hanya jauh tapi selalu diluar prediksi. Berbagai hal bisa jadi memaksa perjalanan terhenti beberapa saat atau bahkan mengharuskan mereka bermalam di jalan, karena ban mobil meletus, rusak mesin, atau ada penghadangan dan berbagai rintangan lainnya. Kecuali itu mereka yang berduit akan memilih melalui jalur laut berangkat

dari pelabuhan Awerangnge menuju Makassar dengan menumpang pada kapal kayu yang juga diperuntukkan memuat barang.

Kondisi yang begitu sulit seperti itu, dan hadirnya Partai Komunis Indonesia tentunya menjadi angin segar. Bujuk rayu yang awal mulanya hanya pada pegawai penjara perlahan mulai menyebar ke masyarakat. Bagi para pegawai penjara ini sesuatu yang sangat menyenangkan karena selain menerima bantuan tersebut mereka juga tetap menerima gaji. Dan bagi masyarakat yang umumnya adalah petani tentu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan. Pada akhirnya para pegawai penjara ini, karena permintaan dari pimpinan yang ada di Makassar untuk menambah anggota, maka mereka pun mencari anggota di tengah-tengah masyarakat dengan cara menjanjikan masyarakat seperti yang telah mereka terima. Awalnya keraguan tentunya masih menghinggapi sejumlah orang tetapi pada akhirnya, karena sudah melihat beberapa bukti, kemudian menerima dan bergabung. Mereka yang menerima bantuan tersebut kemudian di daftar sebagai anggota.

⁹ Kota Makassar dan Kota Pare-pare saat itu sebagai tempat tujuan pembelian bahan kebutuhan pokok berupa minyak, gula pasir, beras dan berbagai kebutuhan lainnya seperti pakaian karena didukung oleh keberadaan pelabuhan besar yang memungkinkan bertumbuhnya pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat. Muda sebenarnya juga memiliki pelabuhan untuk kapal kayu yang bernama Pelabuhan Awerangnge tetapi pada saat 1965 belum berfungsi seramai

pertengahan tahun 1970an hingga tahun 1990an. Dan pelabuhan tersebut kini tidak lagi ramai seiring dengan semakin berkurangnya jumlah kapal kayu yang beroperasi. Pelabuhan tersebut dulunya difungsikan selain untuk bongkar muat barang pengusaha yang membeli barang di Surabaya, kapal penumpang, dan bongkar muat ikan oleh para *Pa'Bagang* dari berbagai daerah.

Namun perjalanan ini ternyata memiliki pasang surut karena adanya kecurangan, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan oleh sejumlah orang. Menurut pengakuan umumnya masyarakat, pembagian yang dijanjikan untuk setiap bulan seringkali tidak lagi dipenuhi, kecurigaan mulai muncul pada mereka yang ditugaskan mengelola. Ada dugaan dari masyarakat mereka yang menyembunyikan pembagian itu, bahkan ada yang menerima tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena dikurangi dengan alasan untuk biaya administrasi. Keraguan dan kecurigaan ini mulai merebak di masyarakat sehingga masyarakat yang belum masuk dan terdaftar mengurungkan niatnya untuk bergabung. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang tetap masuk karena berpikiran bahwa berapa pun yang diterima tidak ada ruginya karena mereka tidak dituntut mengeluarkan uang, cukup dengan dicatatkan nama, selesai.

Namun sebelum semua masyarakat masuk dan menginternalisasi orientasi politik dan semangat perjuangan di tubuh Partai Komunis Indonesia, Peristiwa 1965 meledak di Pulau Jawa. Dan berselang kurang lebih satu bulan, melalui pemberitaan lewat radio dan

surat resmi pemerintah menetapkan Partai Komunis Indonesia akhirnya ditetapkan sebagai partai terlarang sampai juga di Kabupaten Muda. Instruksi untuk mencari dan menangkap mereka yang menjadi anggota pun tersebar melalui radio dan surat resmi dari pemerintah. Surat resmi pemerintah pada saat itu di Kabupaten Muda di tembuskan ke Kejaksaan. Bersama sejumlah organisasi masyarakat dan partai bergerak mencari dan “dikumpulkan”¹⁰ orang-orang yang ada dalam daftar yang diduga sebagai anggota Partai Komunis Indonesia tersebut. Organisasi Pemuda Anzor yang berada di bawah Pimpinan Puang Siang dan PSI dibawah kepemimpinan H. Ilyas bersama aparat bergerak mencari dan membawa mereka ke lapangan di samping Kantor Kodim.

Anggota Partai Komunis Indonesia yang telah dikumpulkan tersebut dimintai keterangan satu persatu. Dalam penuturannya lebih banyak mengaku saya tidak tahu menahu dengan partai tersebut dan bahkan tidak tahu kalau dia masuk namanya di dalam daftar, padahal menurut pengakuannya belum pernah menerima sumbangan berupa bahan kebutuhan pokok. Pengakuan lainnya adalah mereka memang

¹⁰ Kata “dikumpulkan” yang saya terjemahkan dari bahasa Bugis *ipaddeppung* adalah term yang umum diutarakan oleh semua informan pada saat wawancara. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa *iyala manengni ipaddeppungni ri lapangange* (semua diambil dikumpulkan di lapangan). Informan tidak menggunakan term Bugis *Itikkeng*

(artinya ditangkap) karena mereka menilai orang yang diindikasikan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia tidak melarikan diri dan tidak melawan, selain itu di antara mereka juga banyak yang tidak tahu menahu tentang partai itu, sehingga mereka tidak dianggap orang yang ditangkap.

masuk karena bujuk rayu pemberian bahan kebutuhan pokok dan alat pertanian berupa cangkul, tetapi umumnya mengaku belum pernah ada kegiatan bahkan pertemuan yang memberikan sosialisasi seperti apa perwajahan orientasi politik Partai Komunis Indonesia tersebut. Sehingga ketika ada peristiwa yang sangat mengiris sisi kemanusiaan, mereka pada dasarnya sangat kebingungan dan turut menyayangkan peristiwa pembunuhan tersebut. Bahkan sampai sekarang, mereka yang diindikasikan menjadi anggota termasuk yang memiliki tanda di KTPnya juga turut mengecam peristiwa tersebut, terlebih ketika mereka melihat dulu peristiwa pembantian melalui film G.30.S/PKI yang sering diputar di layar kaca melalui stasiun TVRI.

Dikumpulkannya mereka yang ada dalam daftar sebagai anggota Partai Komunis Indonesia di tengah lapangan hanya diberikan pengarahan. Menurut informasi, pada saat itu tidak ada peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan, terlebih sampai pada aksi pembunuhan. Isi pengarahan yang kemudian tersebar luar luas juga di seluh masyarakat di Kabupaten Muda kurang lebih adalah "Partai Komunis Indonesia sekarang ini sudah dilarang diikuti. Ia tidak boleh lagi ada di Indonesia. Kalau ada yang diam-diam masih menjadi anggota atau mengikuti pertemuannya, akan ditangkap dan dipenjarakan." Ditambahkan bahwa, "Partai Komunis itu adalah partainya orang-orang yang tidak beragama,

tidak bertuhan, dia sukanya membantai orang seperti yang dilakukan terhadap sejumlah jendral di Jawa, partainya orang licik suka mengadu-domba."

Walaupun tidak ada insiden kekerasan fisik dan pembantian namun dampak sosial dari isi pesan itu pada akhirnya membawa pengaruh dalam relasi sosial di antara anggota masyarakat. Karena adanya kemiripan perilaku dari pesan itu, mempengaruhi psikologi berkomunikasi dan berinteraksi masyarakat, di antaranya masyarakat sering melabel dan menuduh satu sama lain sebagai PKI karena adanya kemiripan karakter yang terpapar dalam pesan pengarahan yang disampaikan di tengah lapangan. Artinya masyarakat memberikan makna baru bagi PKI tidak lagi sebagai sebuah organisasi politik tetapi bertransformasi makna menjadi suatu perilaku negatif yang *ahumanis*.

Nuansa Harmonisasi dalam Relasi Orang Muda

Sejak Tahun 1965 hingga dewasa ini Kabupaten Muda tidak pernah mengalami pertikaian horisontal yang berskala besar, kecuali perkelahian yang sifatnya personal dan perkelahian antar siswa yang pernah terjadi di tahun 1990an antara SMA 1 Muda dengan SMA PGRI yang bergabung dengan SMK Muda. Pertikaian yang terakhir ini dinilai sebagai gejala kenakalan remaja dan cukup mudah diselesaikan oleh pihak

sekolah dan kepolisian dengan cara mengidentifikasi dan selanjutnya memberikan sanksi.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa secara umum ketika berada di Kabupaten Muda, orang merasakan adanya harmonisasi, dan inipun yang tentunya dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Penegasan kondisi harmonis itu semakin kuat dengan diyakinkannya oleh pemerintah disetiap sela pertemuan dengan masyarakat yang senantiasa menitipkan pesan mengatakan “kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan perdamaian di wilayah kita yang sudah lama tercipta ini.” Dalam satu cara pandang pesan tersebut tentunya sangat positif dan konstruktif. Tetapi pada sisi lain pesan ini meninggalkan persoalan tersendiri. Pesan seperti ini terlalu membungkus realitas dengan bungkusan besar yakni harmonisasi namun terkesan tidak mau tau dengan persoalan-persoalan kecil yang sifatnya poliponik, yang boleh jadi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keserasian relasi sosial masyarakat.

Dalam sejarahnya peristiwa 1965 pada dasarnya tidak menyebabkan adanya korban dan kekerasan seperti di daerah lain, khususnya di pulau Jawa, tetapi peristiwa ini sejatinya mendapatkan perhatian yang maksimal karena secara historis merupakan peristiwa nasional dan ternyata masih meninggalkan jejak deharmonisasi bagi masyarakat.

Di Kabupaten Muda sendiri gejala deharmonisasi dari peristiwa ini memiliki jejak historisnya pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966. Peristiwa itu merupakan dampak psikologis dari dikumpulkannya orang-orang yang ada dalam daftar sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Peristiwa itu terjadi karena masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa PKI itu dideskripsikan dalam wacana sebagai beringas, tidak berprikemanusiaan, tidak beragama-tidak bertuhan, dan berbagai identitas *ahumanis* lainnya. Seperti yang di uraian di atas PKI kemudian mendapatkan makna baru tidak sebagai organisasi politik, tetapi justeru menjadi identitas karakter yang berada di luar diri manusia yang mengintai siapapun, dan perilaku yang sifatnya *ahumanis* akan dengan segera masyarakat mendapatkan kekuasaan dan legitimasi entah dari mana untuk melabel orang tersebut sebagai PKI.

Peristiwa itu dapat dilihat dari sebuah kejadian yang di alami oleh Wa' Baco seorang kepala keluarga yang sempat merasakan langsung peristiwa 1965 dan termasuk orang yang berkesempatan mendapatkan pembagian bahan pokok seperti gula dan cangkul saat itu. Tetapi dalam penuturannya ia tidak turut dibawa ke lapangan untuk dimintai keterangan dan diberikan pengarahan, namanya tidak ada tercantum dalam daftar. Namun peristiwa lain justeru menghampiri, ia tetap mendapatkan label PKI bermula pada saat

menghadiri sebuah hajatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga di kampung itu. Semua tamu sudah hadir dan sebagian di antaranya mengambil tempat di bawah kolong rumah.¹¹ Setiap tamu mengambil kursi (bugis: *kadera*) sebagai tempat duduk yang telah disediakan oleh tuan rumah yang dipinjam dari tetangga terdekat dan membentuk formasi posisi duduk secara acak atau berkelompok, tidak jarang dan menjadi hal biasa ada orang yang tidak mendapatkan tempat duduk sehingga harus berdiri, berjongkok atau mencari alternatif tempat duduk yang bisa dimanfaatkan sekedar untuk duduk. Tetapi ketika ada orang yang baru datang dan dihormati maka secara spontan---tetapi tentunya sangat dipengaruhi oleh kesadaran struktur dalam masyarakat---merelakan kursinya untuk diberikan pada orang yang

baru datang tetapi dihormati tersebut.

Menurut informasi, H. Ilyas yang saat itu sudah hadir, tiba-tiba melihat dan memanggil Wa' Baco. Awalnya masih biasa saja, wa Baco menghampiri H. Ilyas---Sebelum dipanggil, menurut keterangan selama ini Wa' Baco sudah lama menghindari bertemu H. Ilyas. Namun kali ini keduanya akhirnya bertemu. H. Ilyas menanyakan kapan dibayar utang sapinya dan kenapa setiap dicari di rumah tidak pernah berada di rumahnya. Wa' Baco berusaha membantah dengan mengatakan "saya tidak pernah ke mana-mana" yang menyebabkan H. Ilyas menjadi sangat marah di tengah orang banyak dan akhirnya mengatakan "berarti kau bersembunyi kalau saya datang" dan selanjutnya mengeluarkan umpatan "*tellaco*¹² PKI *mettommiha*

¹¹ Di Muda waktu itu hampir semua rumah berbahan dasar kayu atau bambu dengan bentuk rumah panggung---rumah tradisional orang Bugis, sedangkan rumah dengan bahan dasar batu-bata belum banyak dijumpai. Hanya anggota masyarakat yang memiliki modal (*To Sugi*) dan atau bangsawan yang memiliki rumah seperti itu, misalnya rumah milik orang tua Mayor Jendral A. Mattalatta. Secara ontologis Rumah panggung bagi orang bugis sebenarnya memiliki pembagian atas 3 ruang yang dimaknai seperti bentuk tubuh manusia yang terdiri dari kepala, badan dan kaki. Tetapi secara fungsional ke tiga ruang itu memiliki kegunaan. Kolong rumah (*wasao bola*) digunakan selain untuk menyimpan binatang peliharaan seperti ayam dengan membuka kandang sekaligus juga menjadi arena interaksi sosial dengan para tetangga dikala waktu luang dapat berbincang-bincang di balai-balai yang tersedia. Pada kesempatan lain ruang ini

menjadi tempat melayani para tamu ketika ada acara dan di badan rumah tidak muat, ruang ini lebih umum diisi oleh gender laki-laki. Ruang tengah (*Ale Bola*) menjadi tempat interaksi anggota keluarga di hari-hari biasa dan juga menjadi tempat agung menerima tamu, khususnya tamu jauh. Ruang tengah ini juga masih terbagi lagi secara horisontal berdasarkan fungsinya, yakni *lego-lego*, *ale bola tengnga*, dan *jongke*. Ruang yang paling tinggi secara pertikal adalah *rakkeang*, yang difungsikan untuk menyimpan hasil panen yang berupa padi atau jagung.

¹² Dalam bahasa bugis *Tellaco/Tailaso* adalah ucapan yang sangat tidak baik dan berkonsekuensi *siri'* karena menyerang personalitas orang dalam hal ini harga diri, terlebih ketika diucapkan di khalayak umum. Pengucapan tersebut sama dengan menabuh gendang perang atasnya. Dan walaupun kasusnya sangat pribadi tetapi seringkali

ikotu! (Tellaco Memang kau itu PKI). Serentak menjadi ribut dan keduanya mulai berhadap-hadapan namun cepat dileraikan oleh tamu yang ada di situ. Kejadian tersebut menjadi sangat heboh karena terjadi di tengah orang banyak yang sama-sama tentunya akan tetap menjaga harga dirinya. Kehebohannya akan menjadi lain ketika bertemu di rumah dalam keadaan tidak banyak orang, karena tidak banyak yang mengetahui. Kejadian ini memunculkan pro dan kontra, satu penilaian mendasarkan pada argumen bahwa memang H. Ilyas wajar marah karena utang itu sudah lama dan narekko engka addengeng mallegge, naulle mallegge'ni addengenna yallulesuia ku Aje singe'i (artinya, kalau ada tangga yang berbekas karena seringnya diinjak pulang pergi dengan tujuan untuk menagih maka tangganya pasti sudah berbekas selalu didatangi oleh Aji untuk menagih) terlebih H. Ilyas saat itu sudah mulai berada pada masa sulit/krisis usaha yang dijelankannya. Persi lainnya justeru melihat dan mempersalahkan H. Ilyas dengan mengatakan *Aje sala to nasaba manangka lao singe'i taue ri tau igae, siddiko aji danna taroi sabbara' ku atimmu* (artinya, tidaklah elok seorang Haji melakukan perbuatan menagih di depan umum, mestinya dia bisa lebih bersabar).

Tindakan melabel orang secara terbuka sebagai PKI menurut

informasi bukanlah kali pertama terjadi di tengah masyarakat, beberapa peristiwa lainnya sudah mendahului dan sampai berkelahi tetapi tidak memakan korban dan juga tidak tersebar luas, namun peristiwa di atas menjadi meluas dan besar karena terjadi di tengah banyak orang dan dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat dan juga menjadi bagian yang turut serta mengumpulkan orang yang ada dalam daftar bersama Puang Siang dari Pemuda Ansor.

Menurut cerita, Wa'Baco sempat mengklarifikasi bahwa "apa buktinya saya PKI, tidak ada PKI di Muda ini, Cuma dibodo-bodoiji orang dan karena miskinnyaji orang Muda. Kalau memang kita PKI kenapa tidak ditangkap dan dipenjara, kan tidak ada juga yang dibunuh seperti di Jawa sana, kita tetap juga sembahyang. Itu karena kami miskin jadi kau semena-mena sama kami¹³". Persoalan ini akhirnya berusaha didamaikan dengan jalan dipertemukan oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Namun pertemuan itu tidak terselesaikan dengan jernih, karena orang-orang yang merasa berada pada posisi lemah ketika menghadapi persoalan seringkali menjadikan label tersebut sebagai *hidden transkrip* dengan mengatakan "PKI memengki' kasi' na idi'e. (memang kasian kita ini PKI) label ini menjadi sebetuk olok-olokan dan atau mentransformasi menjadi senjata perlawanan bagi

menarik kerabat demi menegakkan siri' atau menegakkan rasa malu.

¹³ Bahkan yang pernah dituduh pada saat tarikh 1965 kini sudah menyandang gelar Haji dan menjadi pengurus pembangunan Masjid.

orang-orang yang termarjinalkan atau terdiskreditkan secara sosial budaya di masyarakat. Dewasa ini, tentunya hal ini tidak lagi keluar secara vulgar seperti pada kasus tersebut di atas, namun label-label yang relatif sama maknanya sebenarnya hadir menggantikan dan mewarnai relasi sosial masyarakat.

Terpaparnya kasus seperti di atas, memberikan suatu kerangka pemahaman lain atas pemahaman konflik yang sudah ada. Artinya mengidentifikasi suatu gejala konflik tidak cukup hanya berhenti pada yang terjama dengan mudah oleh panca indra. Bagi masyarakat, kata yang memuat ejekan langsung pada orang atau sebaliknya kata-kata yang seolah merendahkan diri sendiri tetapi sebenarnya ditujukan untuk lawan dalam bentuk *hidden transkrip* adalah bentuk lain dari sebuah konflik. Dengan itu, secara teoritis harmonisasi yang dihidupi oleh masyarakat tidak lebih dari sebuah nuansa. Dimana batas antara harmoni dan konflik begitu tipis, serta prosesnya bolak-balik.

Kekuatan Kultural Masyarakat Mentransformasi Memori 1965 Menjadi Harmonisasi: Suatu Inspirasi atas Model Teoritisasi "Polarisasi untuk Tampak Kontradiksi" ala Christian Pelras.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Muda tidak berada pada sebuah kondisi yang betul-betul harmonis, karena memori kolektif

peristiwa 1965---walaupun sudah bertransformasi---yang masih selalu hadir mewarnai relasi sosial masyarakat. Gejala nuansa hamonisasi yang terpapar di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang hadir secara alami, melainkan adanya suatu gerak budaya internal yang berada pada masyarakat Muda dan boleh jadi masyarakat Bugis pada umumnya.

Katakanlah bahwa itu adalah harmonisasi, maka harmonisasi yang tampak pada dasarnya adalah sebuah polarisasi untuk tampak kontradiksi. Artinya Masyarakat Muda tidak betul-betul berada dan atau **mau** berada pada kondisi berkonflik dan juga pada kondisi harmonis sepenuhnya, ia akan memperlakukan memori 1965 dan menghidupinya secara bolak-balik. Karena itu memori peristiwa 1965 dianggap sebagai potensi untuk menjaga pandangan hierarkis dan egalitarian, kompetisi sekaligus berkompromi.

Asumsi di atas dapat kita rujuk pada gejala sosial yang ada di tengah masyarakat yang telah terpapar menjadi sebuah cerita sejarah memori 1965. Seperti di ceritakan pada dua bagian sebelumnya di dalam poin pembahasan ini menjelaskan bahwa pada tarikh 1965 masyarakat baru saat itu satu sama lain dengan mudah saling melabel. Akibatnya relasi-relasi sosial tentunya mengalami gangguan. Hanya saja setelah peristiwa tersebut kondisi kembali dalam "nuansa" harmonis. Pertanyaannya adalah kekuatan apa

yang menyebabkan dengan mudahnya tercipta hamonisasi. Dan pertanyaan itulah yang akan direspon di dalam poin ini.

Menurut informasi, sejak peristiwa 1965 itu terjadi, beberapa orang mendapatkan label yang menurut mereka tidak pantas diterima, membuat kondisi psikologis mereka cukup terganggu, tetapi dalam kerangka orang Bugis inilah yang disebut *masiri'* (malu). Di antara masyarakat ada yang berpemahaman bahwa pelabelan tersebut lebih karena ia dinilai karena kemiskinan dan kebodohnya.

Mendapatkan label sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, bagi masyarakat yang dilabel, bukanlah sebuah persoalan, akan tetapi yang menjadi persoalan karena adanya penjelasan ikutan yang menyertai, yakni orang PKI tidak bertuhan dan sadis. Dimana bagi mereka hal itu tidak melekat di dalam diri mereka dan bahkan sangat kontradiktif, seperti yang di alami Pak Ali dan keluarganya. Sebagai pegawai penjara, Pak Ali sehari-harinya bertugas sebagai mana layaknya. Secara religius pak Ali sangat rajin pergi beribadah ke mesjid. Begitu pun yang terjadi dengan masyarakat yang lain yang telah di label. Bahkan menurut mereka "*yami na ipakkukihe nasaba idi' tona donggo-donggo, idi tona kasiasi, de' menna naipakuhe tau engkae*" (artinya kita diperlakukan begini itu karena kita ini orang miskin kita juga bodoh, mana orang berada diperlakukan begini). Bukan hanya

itu, mereka akhirnya menyadari betapa besar konsekuensi yang harus di terima dari peristiwa tersebut, di antaranya mendapatkan stereotip dari masyarakat, anak-anaknya tidak lagi mendapatkan pendidikan dengan lebih baik.

Karena kondisi terpuruk inilah kemudian masyarakat yang mendapatkan label berusaha bangkit merubah semua ke dalam suatu kekuatan berkompetisi dan berikhtiar mendapatkan suatu posisi di dalam hierarki masyarakat. Pandangan kompetisi seperti ini dapat dilihat dari Bourdieu ketika menjelaskan kompetisi antara *ortodoxa* (pemilik wacana dominan) dengan *heterodoxa* (pemilik wacana tandingan) untuk mencapai hierarki *doxa*. Kompetisi itu semakin kelihatan pada orang Muda yang mendapatkan label ketika mereka akhirnya mendapatkan semangat berjuang. Kondisi kehidupan yang dialami oleh wa' Baco bersama anak-anaknya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kalimantan mencari penghidupan yang lebih layak setelah ia mendapatkan perlakuan dari H. Ilyas. Pada akhirnya apa yang diimpikan dapat terwujud, begitu juga dengan beberapa keluarga yang lain yang mendapatkan label yang sama. Karena beberapa alasan, ia kembali ke Muda dengan mendapatkan keberhasilan baik secara ekonomi atau status sosial sebagai Haji dan juga ada salah seorang anaknya yang sempat mendapatkan pendidikan memadai mendapatkan pekerjaan di

Bandara Sultan Hasanuddin, waktu itu masih berkedudukan di Maros.

Memori 1965 oleh mereka ditransformasi menjadi suatu kekuatan di dalam proses kompetisi, demi menghapus label PKI. Mereka yang dilabel dan dan telah mendapatkan status sosial ternyata tidak memasang benteng sosial yang kokoh dalam berelasi dengan orang dan keluarga yang dulunya telah melabel mereka dan keluarganya. Walaupun ada perasaan sakit hati, sikap berkompetisi tetapi juga mereka masih mau berkompromi, walaupun mereka membangun persaingan tetapi sekaligus juga membangun kesetiakawanan. Gejala itu dapat dilihat ketika ada salah seorang keluarga yang sudah melabelnya datang meminta bantuan kepada wa' Baco untuk mendapatkan kemudahan, melalui anaknya, masuk ke Bandara mengantar keluarganya yang mau naik haji. Bagi wa' Baco kita tidak selalu berada di atas sehingga apa yang terjadi dulu tidak perlu terlalu dikenang dan lebih baik berkompromi. Bahkan menurut informan, dengan kejadian itu justru ia merasa beryukur karena akhirnya membawa keluarganya pada kondisi yang dialaminya sekarang ini. Mereka membayangkan kalau hal itu tidak terjadi, belum tentu ia akan berusaha sekeras itu bekerja demi merubah nasibnya.

PENUTUP

Pelabelan yang dialami oleh beberapa orang pada masyarakat di Kabupaten Muda dapat dikatakan sebagai kekerasan simbolik. Pelabelan ini berlangsung tidak hanya pada kurun waktu 1965, tetapi telah menjadi sebuah ingatan/memori yang memiliki sejarahnya dan narasinya yang berbeda dengan narasi besarnya tentang peristiwa G. 30. S/PKI.

Bagi orang Muda PKI bukan berdarah-darah secara fisik melainkan sakit hati, *masiri'* dan *siri*, karena dari awal kehadiran PKI mereka tidak pernah memahami dengan baik orientasi politik dari partai tersebut. Narasi tambahan dari pelabelan yang mengatakan bahwa mereka tidak bertuhan dan sadis adalah konstruksi pelabelan yang tidak dapat mereka terima. Karena sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dituduhkan tersebut dan ketika mereka masuk ke dalam dirinya dan menemukan dirinya berseberangan dengan penjelasan narasi dari pelabelan.

Kondisi disharmonis---dalam arti yang sebenar-benarnya---akhirnya sempat mewarnai kehidupan sosial di daerah tersebut. Relasi sosial tidak cukup nyaman dihidupi. Namun itu tidak berlangsung lama dan akhirnya dapat terkendali. Pemerintah secara aktif terlibat mengkonstruksi dan mendiseminasikan konsepsi harmonisasi melalui kesempatan-kesempatan pertemuan, yang akhirnya terbangun pemahaman dan kesadaran harmonisasi yang diinginkan oleh pemerintah, walaupun

demikian tidak sepenuh masyarakat berada pada kondisi harmonis. Masyarakat justru berada pada nuansa harmonisasi di mana ia bolak-balik dari harmonis ke ingatan/memori tarikh 1965 (yang dapat dikatakan sebagai kondisi konflik) yang mempengaruhi bentuk dan kualitas relasi sosial di tengah masyarakat.

Gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Muda tidak berada pada sebuah kondisi yang betul-betul harmonis tetapi juga tidak sepenuhnya berkonflik, karena memori kolektif peristiwa 1965--- walaupun sudah bertransformasi---ia masih selalu hadir mewarnai relasi sosial masyarakat. Gejala nuansa hamonisasi yang terpapar di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang hadir secara alami, melain adanya suatu gerak budaya internal yang berada pada masyarakat Muda dan boleh jadi masyarakat Bugis pada umumnya. Karena itu memori peristiwa 1965 dikreasi oleh masyarakat menjadi potensi untuk menjaga pandangan hierarkis dan egalitarian, kompetisi sekaligus berkompromi.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (Terjemahan oleh Yudi Santosa). Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourieu. Menyingkap Kuasa Simbol*. Jalasutra, Yogyakarta.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Budaya. Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunis Melalui Sastra dan Film*. Marjin Kiri, Serpong-Tangerang Selatan.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam. Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. ISAI bekerjasama dengan The Asia Foundation. Yogyakarta.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Rajawali Pers, Jakarta.
- 2014. *Posmodernisme. Teori dan Metode*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Massardi, Noorca M. 2006. *September*. Tiga Serangkai, Solo.
- Pelras, Christian. 2006 *Manusia Bugis*. Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, Jakarta.